



KETERANGAN PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah merupakan dasar untuk penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga terbitlah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024. Untuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perlu disusun Peraturan Kepala Daerah masing masing Kabupaten / Kota. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat ini mengatur pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024. Sehingga dengan adanya peraturan Bupati ini dapat merupakan petunjuk pelaksanaan dalam mengelola pajak dan retribusi Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan rancangan peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2024`.

Sasarannya adalah pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

C. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksana Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata cara Pelaporan, Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Masa Pajak, dan Tahun Pajak;
- b. Penilaian PBB-P2 dan besaran Persentase NJOP dan pertimbangan penentuan persentase NJOP;
- c. jenis dan bentuk Reklame, pengecualian objek Reklame dan tata cara perhitungan nilai sewa Reklame;
- d. Besaran NPA;
- e. Konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- f. Tata cara pemungutan pajak;
- g. Pemanfaatan penerimaan Retribusi
- h. Tata cara pemungutan Retribusi;
- i. administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal;
- j. administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi;
- k. administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah;
- l. Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
- m. tata cara pembinaan dan pengawasan Pajak dan Retribusi; dan
- n. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat ini mengatur pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024. Sehingga dengan adanya peraturan Bupati ini dapat merupakan petunjuk pelaksanaan dalam mengelola pajak dan retribusi daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.